ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai Gelar sarjana sosial Program Pendidikan Strata satu program Administrasi Negara

OLEH

NAMA: TIARA DIA PRANSISKA

NPM : 220411088

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si	SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1030058402	NIDN. 1021117906

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ( )
2. SARJAN M, S.Sos., M.Si (Pembimbing II) ( )
3. Sahri Muharam, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ( )
4. Risvandi, S.Pd.I.,M.Si (Anggota Penguji II) ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIKS DEKAN

SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	:	ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA	:	TIARA DIA PRANSISKA
NPM	:	220411088
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS	:	ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS	:	ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si	**SARJAN M. S.Sos., M.Si**
NIDN. 1002059002	**NIDN. 1008128002**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 100510890

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : TIARA DIA PRANSISKA

NPM : 220411088

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 8 Juni 2026



TIARA DIA PRANSISKA
NPM. 22041108

MOTTO

"Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah".

(Q.S Al Ghafir:44)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)".

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

"Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun".

(Tiara Dia Pransiska)

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Sebuah ucapan rasa syukur "Alhamdulillah" penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah.* Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Teruntuk cinta pertama sekaligus penyemangat penulis Ayahanda Tercinta, Calmi. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, serta perjuangan ayah yang tidak pernah lelah demi putri pertamamu ini. Meskipun ayah tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, namun dengan kerja keras, pengorbanan, dan ketulusan hati, ayah mampu mengantarkan putri pertamamu hingga merasakan pendidikan yang memadai sampai pada tahap ini. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak lepas dari dukungan, nasihat, dan doa ayah.

Teruntuk pintu surgaku Ibunda Tercinta, Siska Elvi. Terimakasih atas cinta yang tidak pernah putus, doa yang selalu mengiringi setiap langkah, serta pengorbanan yang begitu besar demi masa depan anak-anakmu. Ibu selalu menjadi tempat pulang yang paling menenangkan, sumber kekuatan, serta penyemangat ketika penulis merasa lelah dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Teruntuk cinta kasihku adik-adikku Raka Dwi Andika, Muhammad Raki, dan Putri Aqila. Terimakasih atas dukungan, perhatian, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran adik-adikku selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, memberikan nasihat, bantuan, serta semangat yang begitu berarti.

Teruntuk sahabat seperjuanganku Silvia Ramadhani dan May Shindy Febiola. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Banyak cerita, tawa, serta perjuangan yang telah kita lalu bersama yang menjadi kenangan berharga dalam perjalanan ini. Kehadiranmu tidak hanya sebagai sahabat, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatka, dan saling menyemangati ketika menghadapi kesulitan.

Terakhir, sangat berterimakasih kepada wanita yang telah berjuang tanpa lelah yaitu Tiara Dia Pransiska. Sosok perempuan yang memiliki impian yang sangat besar, yaitu diri saya sendiri. Terimaksasih telah berusaha keras menyelesaikan skripsi ini meski banyak rintangan, kelelahan, dan malam-malam panjang tanpa ada kata menyerah hingga menyelesaikan studi ini. Bersyukur dan berbahagialah dengan pencapaianmu, tiara, jangan pernah sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Semoga langkah kebaikan selalu mnyertaimu.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



TIARA DIA PRANSISKA
NPM. 220411088

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sebuah ucapan rasa syukur "Alhamdulillah" penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan *(yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur)* mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **"Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi",** yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah mencoba menemukan sebuah urgensi implemntasi dari suatu agenda kebijakan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pembangunan telah dilaksanakan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat penelitian ini hendaknya dapat memberikan pembangunan rumah yang layak huni untuk masyarakat yang membutuhkan.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituil berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani. S.Pdi, M.Pdi, sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M. S.Sos., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah serta memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mengacc judul penelitian dan transkip nilai sebagai salah satu syarat untuk penelitian ini dikonfrehensifkan.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Sarjan M. S.Sos., M.Si, selaku pembimbing II penulis yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Sumarli selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan serta motivasi penulis dalam kesuksesan penulisan penelitian ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
9. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemerintahan desa dan masyarakat Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap

dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal 'Alamin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teluk Kuantan, 5 Juni 2026

Penulis

TIARA DIA PRANSISKA
NPM.220411088

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

ABSTRAK INDONESIA xix

ABSTAK INGGRIS xx

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.4.1 Manfaat Praktis 8

1.4.2 Manfaat Teoristis 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka 9

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara 9

2.1.2 Teori/ Konsep Kebijakan Publik 11

2.1.2.1 Formulasi Kebijakan 15

2.1.2.2 Impelemntasi Kebijakan 16

2.1.3 Teori/ Konsep Desa dan Masyarakat Desa 18
2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan 20
2.1.5 Teori/Konsep Evaluasi Kebijakan 23
2.1.6 Rumah Layak Huni 27
2.1.7 Teori/Konsep Kesejahteraan Masyarakat 29
2.2 Kerangka Pemikiran 31
2.3 Hipotesis 32
2.4 Definisi Operasional 32
2.4.1 Efektivitas 32
2.4.2 Efisien 32
2.4.3 Kecukupan 32
2.4.4 Pemerataan 33
2.4.5 Responsif 33
2.4.6 Ketetapan 33

BAB III : METODE PENELETIAN

3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Informan 35
3.3 Sumber Data 36
3.3.1 Data Primer 36
3.3.2 Data Sekunder 36
3.4 Fokus Penelitian 37
3.5 Lokasi Penelitian 37
3.6 Metode Pengumpulan Data 37
3.6.1 Wawancara 37
3.6.2 Observasi 38
3.6.3 Dokumentasi 38
3.7 Metode Analisis Data 38
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 40

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 41
4.2 Keadaan Gegrafi Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 41
4.3 Visi dan Misi Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 42
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi……44
4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 44
4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... …… 45
4.7 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 45
4.8 Jumlah Rumah Ibadah Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 46
4.9 Kondisi Sosial Budaya Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 46
4.10 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 47
4.11 Tugas Pokok dan Fungsi Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 47

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden..... 52
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 52
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.... 53
5.2 Pembahasan Dan Hasil Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 53

5.2.1 Indikator Efektivitas 53
5.2.1.1 Kriteria 54
5.2.1.2 Keadilan 58
5.2.2 Indikator Efisiensi 63
5.2.2.1 Usaha 63
5.2.2.2 Hasil 67
5.2.3 Indikator Kecukupan 72
5.2.3.1 Hasil 72
5.2.3.2 Memecahkan Masalah 77
5.2.4 Indikator Pemerataan 81
5.2.4.1 Dana 82
5.2.4.2 Fasilitas 86
5.2.5 Indikator Responsivitas 90
5.2.5.1 Perekonomian 91
5.2.5.2 Manfaat 95
5.2.6 Indikator Ketetapan 99
5.2.6.1 Waktu 100
5.2.6.2 Tepat Sasaran 104
5.3 Analisi Hasil Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi... 109
BAB VI : PENUTUP
6.1 Kesimpulan 111
6.2 Saran 111
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
I.1	:	Daftar Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	7
II.1	:	Teori Kebijakan Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	13
II.2	:	Operasional Variabel Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	34
III.1	:	Informan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	36
III.2	:	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	40
IV.1	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	44
IV.2	:	Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	45
IV.3	:	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	45

IV.4 : Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 46

IV.5 : Jumlah Rumah Ibadah Pendidikan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 46

V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 52

V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.1 : Kerangka Pikiran Penelitian tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 31

IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I : Daftar Wawancara Penelitian Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

II : Dokumentasi Penelitian tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

III : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 038/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara

IV : Surat Balasan Riset Dari Dinas Perkim Nomor : 600/DPKPP-SEKR/2026/669 Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

V : Surat Balasan Riset Dari Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari Nomor: 045/PG/II/2026 Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

VI : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Nomor: 045/PG/II/2026 Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

VII : Surat Permohonan Riset Nomor: 141/FIS/UNIKS/XII/2025 Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

VIII : Surat PTSP Nomor: 11DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026 Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

X : Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

XI : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

XII : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

XII : Daftar Riwayat Hidup Penulis

ANALISIS EVALUASI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Oleh :

Tiara Dia Pransiska

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Desa Pulau Godang Kari dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya.. Permasalahan terkait pembangunan rumah layak huni di Desa Pulau Godang Kari ini diantaranya, minimnya kuota untuk Desa Pulau Godang Kari dalam Pembangunan Rumah Layak Huni, karena di Desa Pulau Godang Kari Masyarakat Miskin setiap tahunnya meningkat dan yang tidak memiliki rumah masih banyak dilihat dari data, sedangkan kuota rumah RLH ini terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisi Evaluasi Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya penelitian terkait evaluasi ini, peneliti berharap pemerintah dapat meningkatkan kuota untuk setiap tahunnya agar tujuan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Desa Pulau Godang Kari bisa tercapai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William Dunn yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisi Evaluasi Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum tepat sasaran.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pembagunan, Rumah Layak Huni

EVALUATION ANALYSIS OF LIVABLE HOUSE CONSTRUCTION POLICIES IN IMPROVING WELFARE IN PULAU GODANG KARI VILLAGE, KUANTAN TENGAH DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

ABSTRACT

By :
Tiara Dia Pransiska

This research aims to evaluate the policy for building livable houses in Pulau Godang Kari Village and find out the obstacles in its implementation. Problems related to building livable houses in Pulau Godang Kari Village include the minimal quota for Pulau Godang Kari Village in building livable houses, because in Pulau Godang Kari Village the Poor People increase every year and there are still many who don't have houses as seen from the data, while the quota for RLH houses is limited. The aim of this research is to determine the evaluation of the construction of livable houses in Pulau Godang Kari Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. With research related to this evaluation, researchers hope that the government can increase the quota every year so that the goal of developing livable housing assistance for Pulau Godang Kari Village can be achieved. The theory used in this research is evaluation theory according to William Dunn, namely, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and determination. The research method used is qualitative. The data collection techniques include interviews, observation and documentation. This research was conducted in Pulau Godang Kari Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The results of the research show that the Evaluation Analysis of the Construction of Livable Houses in Improving Community Welfare in Pulau Godang Kari Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency is not on target.

Keywords: Policy Evaluation, Development, Livable Houses

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam menunjang kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang memenuhi standar kelayakan bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga menjadi bagian dari hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program nasional maupun daerah, telah berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan baik melalui anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat.

Namun demikian, evaluasi kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Desa Pulau Godang Kari, yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan salah satu desa yang masih menghadapi permasalahan terkait ketersediaan rumah layak huni. Sebagian masyarakat di desa ini masih tinggal di rumah-rumah dengan kondisi

yang belum memenuhi standar kelayakan, baik dari segi fisik bangunan, sanitasi, maupun akses terhadap fasilitas dasar.

Kondisi ini tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Rumah yang tidak layak huni dapat meningkatkan risiko kesehatan, menghambat produktivitas, dan memperburuk kondisi sosial ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembangunan rumah layak huni diterapkan di Desa Pulau Godang Kari, serta sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebutuhan akan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggi, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas keluarga, perlindungan dari cuaca, serta sarana untuk tumbuh dan berkembangannya kehidupan social. Oleh karena itu, penyediaan rumah yang layak menjadi tanggung jawab moral dan sosial pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yang menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menempati rumah layak, aman, dan sehat.

Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, pemerintah melalui berbagai program baik pusat maupun daerah telah mengalokasikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Salah satu wilayah yang menjadi

sasaran program ini adalah Desa Pulau Godang Kari, yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni di Desa Pulau Godang Kari menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Meskipun anggaran atau dana bantuan telah tersedia dan disalurkan, proses pembangunan banyak yang belum selesai, bahkan ada rumah yang tidak selesai pemasangan lantai keramik nya. Kondisi ini menimbulkan tanda Tanya besar dikalangan masyarakat mengenai efektifitas dan transparansi penggunaan dana bantuan tersebut. Beberapa rumah bantuan terlihat masih ada yang belum selesai, sebagian masih ada yang belum mempunyai lantai keramik.

Selain itu persoalan yang paling menonjol adalah ketidak tepatan sasaran penerima bantuan, Berdasarkan pengamatan masyarakat dan data lapangan, diketahui bahwa masih banyak ada penerima bantuan rumah layak huni yang sebenarnya tidak tergolong miskin atau tidak memenuhi kriteria penerima. Sebaliknya, sejumlah warga yang hidup dalam kondisi ekonomi sangat terbatas, memiliki rumah yang tidak layak, justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Ketimpangan ini menimbulkan kecemburuan sosial serta mengikis rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun pihak yang berwenang dalam proses seleksi dan verifikasi penerima bantuan.

Faktor penyebab terjadinya ketidak tepatan sasaran ini antara lain adalah pendataan yang tidak akurat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penentuan penerima manfaat. Pendataan yang dilakukan tidak selalu berbasis pada kondisi riil masyarakat di lapangan,

melainkan lebih banyak mengandalkan data administrasi yang belum tentu mencerminkan situasi sebenarnya. Dalam beberapa kasus, terdapat pula indikasi adanya unsur kepentingan pribadi atau kedetakan sosial yang mempengaruhi proses penentuan penerima bantuan, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya pengawasan dari instansi terkait, baik dari pemerintah kecamatan maupun dinas perumahan dan pemukiman kabupaten. Pengawasan yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berjenjang seringkali hanya dilakukan secara administratif tanpa tinjauan langsung ke lokasi. Akibatnya, berbagai penyimpangan dalam penggunaan dana dan pelaksanaan pembangunan tidak terdektesi sejak dini. Hal ini juga membuka peluang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan kepercayaan dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, jumlah bantuan rumah layak huni yang diterima oleh Desa Pulau Godang Kari masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan. Berdasarkan hasil pendataan sosial, masih banyak warga desa yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang sudah lapuk, dinding dari papan yang rapuh, lantai tanah, serta atap bocor. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bagi keluarga dengan anak-anak dan lansia yang kesehatannya rentan. Namun, keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah menyebabkan sebagian besar masyarakat masih harus bersabar menunggu program bantuan berikutnya yang belum pasti kapan akan direalisasikan.

Kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan enggan melaporkan adanya dugaan penyimpangan karena takut menimbulkan konflik atau dianggap melawan aparat desa. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan factor penting untuk memastikan agar program bantuan berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. Tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan menjadi lemah dan potensi penyimpangan akan terus terjadi.

Dari sisi teknis pelaksanaan, juga ditemukan berbagai hambatan seperti kurangnya keterlambatan pengiriman bahan bangunan, kurangnya tenaga kerja, hingga perencanaan yang tidak matang. Dalam beberapa kasus, bantuan material tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, atau jumlahnya tidak mencukupi untuk menyelesaikan satu unit rumah. Akibatnya, pembangunan rumah bantuan terhentikan ditengah jalan, meninggalkan struktur bangunan yang tidak dapat ditempati. Hal ini menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat sekaligus pemborosan anggaran Negara.

Dampak dari berbagai permasalahan tersebut sangat nyata diraskan oleh masyarakat Desa Pulau Godang Kari. Dari sisi social, ketidaktepatan sasaran bantuan menimbulkan rasa iri dan perpecahan antar warga. Dari sisi ekonomi, masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Sedangkan dari sisi pemerintahan, muncul penilaian negative terhadap kinerja aparatur yang di nilai tidak transparan dan kurang akuntabel.

Permasalahan ini perlu segera ditangani secara serius melalui evalusi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, penyaluran, dan pengawasan bantuan rumah layak huni. Pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten perlu bersinergi untuk memperbaiki system verifikasi penerimaan agar lebih transparan dan berbasis data actual. Selain itu, pengawasan lapangan harus diperkuat dengan melibatkan lembaga masyarakat, tokoh adat, serta pihak indenpenden agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan tujuan program.

Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni ini merupakan sumber dana dari Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman). Dana sebesar Rp 75 juta untuk satu unit rumah, pembangunan rumah ini besar rumah 6 kali 6 dan 2 kamar. Di Desa Pulau Godang Kari terdapat 4 orang warga yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni tersebut, dan ada 5 orang warga yang berhak mendapatkan tetapi tidak tepat sasaran.

Kriteria Penerima Pembangunan rumah layak huni Menurut Dinas Perkim:

1. Rumah Tangga Miskin
2. Rumah Tangga Berdomisili 5 Tahun
3. Tanah Milik Sendiri
4. Kepala Keluarga Tidak Memiliki Mata Pencaharian
5. Tidak Pernah Mendapatkan RLH
6. Tidak Tanah Sengketa

Tabel I.1 Daftar Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Dusun	Nama Penerima	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Penghasilan /Perbulan
1.	Ambacang Gading	Jumailis	45 th	Petani	4 Orang	1.200.000 -1.400.00
2.	Ambacang Gading	Ides Deka	47 th	Petani	3 Orang	1.000.000 -1.500.00

Sumber : Kantor Desa Pulau Godang Desa 2026

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji evaluasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Desa Pulau Godang Kari, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya terhadap kualitas hidup masyarakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan demi mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni dalam Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni dalam Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menganalisis pembangunan layak huni, serta memperkuat keberhasilan dampak dari pembangunan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Teoristis

1.4.2.1 Memperluas wawasan tentang pembangunan rumah layal huni.

1.4.2.2 Memberikan informasi tentang efektivitas pembangunan rumah layak huni.

1.4.2.3 Memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sosial.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintah atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Chisyati (dalam Kacaribu, 2020 : 5) pengertian administrasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas

Menurut Haryadi (dalam Roslin Sovia dkk, 2022 : 3) pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan mengumpulkan dan mencatat data dan informasi secara sistematis untuk memberikan informasi dan memudahkan pencarian secara umum dalam kaitannya atau sama lain.

Administrasi dalam arti luas, yaitu kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan efektif dan efisien Sialahi. (dalam Rosialin Sovia dkk, 2022 : 4).

Menurut Syafie dan Welasari (2017 : 13) administrasi adalah keseluruhan dari proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumya.

Menurut Hamali (2019 : 4) administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan dalam memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Menurut Sondang dan Pandiangan (2015 : 1) administrasi yaitu sebuah pondasi jaringan yang tertera secara sistematis yang membentuk sebuah hubungan yang saling bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu mekanisma kerja yang tersusun dan mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Menurut Sutha (2017 : 3) administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan mendapatkan kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.

Menurut Ordway Tead (dalam Hamali 2019 : 4) administrasi adalah kegiatan-kegiatan individu dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan.

Administrasi Negara adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan untuk mengurus Negara dengan

menggunakan instrument pengaturan sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengurus Negara dan masyarakat senantiasa berjalan dengan teratur dalam rangkaian mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumya secara efisien dan efektif Makmur, dkk (2017 : 30).

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik lainya untuk mengatasi masalaah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang peraturan, program, atau proyek yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, meningkatkan kesejahteraan, atau memecahkan masalah sosial.

Menurut (Nugroho, 2015, p. 11) Kebijakan Publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau kelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Menurut (Anderson, 2017, p. 8) Kebijakan Publik merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor berkenan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Harold D. Lasswel (Salempessy, 2023, p. 3) Kebijakan Publik merupakan aliran dari keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak otoritatif lainya yang berhubungan dengan tindakan pemerintah.

Menurut Dye (Salempessy, 2023, p. 3) Kebijakan Publik merupakan apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukanya, dan apa yang dilakuan terhadap masyarakat.

Menurut Wiliam Jenkis (Salempessy, 2023, p. 3) Kebijakan Publik merupakan panduan untuk tindakan yang mengungkapkan suatu niat yang direncanakan dan megarahkan para pejabat dalam menjalankan tugas-tugas mereka..

Menurut (Dye, 2016) Kebijakan Publik merupakan studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Menurut Agustino (Salempessy, 2023) Kebijakan Publik merupakan sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintahan dengan lingkunganya.

Menurut (Lasswell & Kaplan, 2015) Kebijakan Publik merupakan sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang di buat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, di buat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada.

Menurut (Dye, 2017) Kebijakan Publik merupakan apapun yang di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, artinya setiap tindakan atau keputusan pemerintah baik bertindak maupun tidak adalah bagian dari kebijakan publik.

Menurut Agustino (Salempessy, 2023) Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang di ambil oleh pemerintah yang

memiliki orientasi pada kepentingan publik, dan menunjukan hubungan erat antara kebijakan dan pelayanan publik.

Menurut (Desrinelti, 2021) Kebijakan Publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara sebagai representasi dari kepentingan rakyat, untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai tujuan tertentu.

Tabel II.1 Teori Kebijakan

Nama Ahli Tahun	**Judul Buku**	**Penjelasan Menurut Para Ahli**	**Relevansi Dengan Penelitian**	**Sumber Data**
(Salempessy, 2023)	Kebijak an Publik	Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan "apa yang pemerintah lalukan, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang dilakukanya terhadap masyarakat".	Menyangkut bagaimana tindakan nyata pemerintah dalam pengelolaan sampah seperti penyediaan sarana dan prasarana.	(Salempess y, 2023) Kebijakan Publik, Cv Gita Lentara.
Anderson, (Hill and Hupe, 2002) (Handoyo, 2012)	Kebijak an Publik	Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan "serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.	Membantu menilai apakah pemerintah betul-betul melakukan rangkaian tindakan seperti mengatur jadwal pengangkutan,d an melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.	(Eko Handoyo, 2012) Kebijakan Publik, Widya Karya Semarang.
Heinz Eulau	Design	Heinz Eulau dan	Membantu	(Evi Satispi,

dan Kenneth Prewitt, 1973 (Agustino 2006 : 6) (Satispi, 2019)	Dalam Kebijak an Publik	Kenneth menyataan bahwa kebijakan publik merupakan "sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan.	melihat apakah pemerintah daerah menjalankan kebijakan secara konsisten, tidak hanya saat awal dibuat, tetapi berulang dan stabil dalam pelaksanaanya seperti pemantauan tps dilakukan setiap hari.	2019) Design dalam kebijakan publik.
(Tahir, 2011) Syafiie, (Tahir 2011)	Kebijak an Publik	Syafiie menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan yang terarah.	Menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah merespon terhadap masalah sampah, serta apakah telah mendorong inovasi dan tindakan terencana dalam pengelolaan sampah.	(Tahir,2011) Kebijakan Publik dan Transparans i Penyelengg ar aan pemerintaha n daerah.
Jann and Wegrich (2007) (Desrine lti, 2021)	Jurnal Kebijakan Publik dan Konsep Pelaksaan	Jan and Wegrich menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kegitan sadar	Membantu menilai apakah pemerintah daerah memahami masalah	(Desrinelti, 2021). Kebijakan Publik dan Konsep Pelaksanaan

		sengaja dan terarah yang dilakukan pemerintahan dalam mencapai tujuan tertentu.	sampah yang terjadi dan menyadari dampaknya bagi lingkungan, kesehatan, dan estetika kota.	,

2.1.2.1 Formulasi Kebijakan

Menurut (Dye, 2017) Formulasi kebijakan merupakan usaha pemerintah melakukan inervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhardap setiap permasalahan di masyarakat, intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif.

Menurut Amitai (Etzioni, 2017) Formulasi kebijakan merupakan model pengamatan terpadu (mixed-scaning) yakni sebagai pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan tambahan, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tertinggi yang menetukan pembuatan pedoman atau petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusankeputusan pokok dan menjalankannya stelah keputusan itu terlegitimasi.

Menurut (Dunn, 2015) Formulasi kebijakan merupakan proses peramalan, yaitu menguji masa depan yang pleusibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat kebijakan yang diusulkan, mengenali kendala yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

Menurut (Mustari, 2015) Formulasi Kebijakan Merupakan masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dan didefenisikan untu kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

Menurut Anderon (Meutia, 2017, p. 71) Formulasi Kebijakan merupakan upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpatisipasi.

Menurut Eugne (Meutia, 2017, p. 71) Formulasi Kebijakan merupakan formulasi yang lengkap menentukan alternatif yang mungkin untuk dibuat kebijakan, dimana kita menilai (mencari) yang terbaik dari kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu , kita mencari satu alternatif yang terbaik.

Menurut Dye (Kadji, 2015) Formulasi Kebijakan Merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan intervensi terhadap aktivitas publik sebagai solusi dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat.

2.1.2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter Dan Van Horn dalam (Subarsono, 2015) Ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementsi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut (Adiwisastra, 2016, p. 63) Implementasi Kebijakan merupakan dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (biokrasi) dalam proses kebijkan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi sebagai ilmu.

Menurut (Dunn, 2015, p. 56): Implementasi Kebijakan merupakan pada hakikatnya bersifat kegiatan praktis, yang dibedakan dari perumusan kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Menurut Josy Adwisastra (Adiwisastra, 2022, p. 13) Implementasi Kebijkan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik dibuat akan menjadi "macan kertas" apabila tidak berhasil dilaksanakan.

Menurut Josy Adwisastra (Adiwisastra, 2020, p. 14) Keberhasilan Implementasi Kebijakan publik kadang kala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana Kebijakan publik tersebut akan dilakukan.

Menurut (Kadir, 2020) Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Satispi, 2019) Implementasi Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuatujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut (Muadi, 2016) Implementasi Kebijakan merupakan operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai satu sasaran tertentu dan

menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.

2.1.3 Teori Desa dan Masyarakat Desa

Menurut Maschab (dalam Suhartono, 2019 : 11) dalam pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. Kemudian Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan sebagainya.

Menurut Sutopo Yuwono (dalam Bintarto, 2017 : 17) salah satu peranan pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor. Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor.

Menurut Suhartono (2015 : 12) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (o) menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Boeke (2015 : 9) misalnya memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri, daerah sendiri, dan kekayaan atau pendapatan sendiri.

Menurut Suhartono (2020 : 12) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

Menurut Soetardjo (dalam Nurholis 2019 : 20 : 21) Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hokum adat. Dalam bentuk asli, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hokum adat).

Menurut Ter Haar (dalam Nurcholis 2017 : 16) Desa adalah satu kesatuan masyarakat hokum adat. Masyarakat hokum adat tersebut juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat memiliki benda-benda material maupun imaterial *(geordnede groupen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen marericel vermogen).*

Menurut Soetardjo, 2017 : 15 (dalam Yuliati, 2015 : 24) Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni *“swedesi”* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (2015:9) desa adalah suatu kesatuan hokum dan didalamnya betempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.4 Teori Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga-warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.

Menurut Deddy T. Tikson (2016) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur

ekonomi, misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan moderniasasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat nelalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan materialisme/sekularisme.

Menurut Riady (2022 : 322) manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus di lakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip – prinsip ke-indonesian dengan tetap memperhatikan perkembangunan global. Prinsip – prinsip tersebut adalah:

1. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan filosofis yang kuat dan mengakar dalam kultur / budaya masyarakat yang ada di daerah.

2. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif, holistik atau menyeluruh, sehingga mampu membangun aspek – aspek yang menjadi satu kesatuan dalam pembangunan

3. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya, seperti pusat perkotaan, pedesaan dan lain sebagainya.

4. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyongkong / memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan,potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannnya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Kementrian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pemerintah telah menetapkan indikator untuk menentukan tingkat fakir miskin yaitu:

1. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan perbulan berdasarkan standar Badan Pusat Statistika (BPS) perwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (Zakat/raskin/santunan sosial). b. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun).
3. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit.
4. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.

5. Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup.

6. Tinggal dirumah tidak layak huni.

7. Kesulitan memperoleh air bersih.

2.1.5 Teori Evaluasi Kebijakan

James P. Lester & Joseph Stewart (dalam Budi Winarno 165 : 23) Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan *(goals)* dan kriteria *(criteria). Goals* merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Di dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat atau instrumen kriteria, sementara dipihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya, evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana programprogram mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain. Evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan, hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di

masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapinya dengan serius.

Evaluasi kebijakan menurut William Dunn bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

1). Efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. (Dunn, 2015 : 429). Dalam hal ini, efektivitas yang dimaksud peneliti adalah penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan pelaksanaan program berjalan dengan adil atau tidak diskriminatif.

2). Efisiensi. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N.

Dunn berpendapat bahwa: Efisiensi *(efficiency)* berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien" (Dunn, 2015:430). Dalam hal ini, efisien yang dimaksud peneliti adalah seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3). Kecukupan. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan *(adequacy)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2015 : 430). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam hal ini, kecukupann yang dimaksud peneliti adalah seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.

4). Pemerataan. Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan *(equity)* erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada

distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2015 : 434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Dalam hal ini, pemerataan yang dimaksud peneliti adalah pendistribusian dana yang merata dan adil serta fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

5). Responsivitas. Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas *(responsiveness)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2015 : 437). Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dalam hal ini, responsviitas yang dimaksud peneliti adalah bagaimana manfaat dari pembangunan rumah layak huni tersebut sudah membantu perekonomian masyarakat miskin yang telah mendapatkan pembangunan rumah layak huni tersebut.

6). Ketetapan. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Dalam hal ini, ketetapan yang dimaksud peneliti adalah pelaksanaan dan pencairan dana sesuai dengan ketetapan waktu yang telah ditentukan serta hasil yang dicapai harus memberikan manfaat untuk penerima bantuan rumah layak huni.

2.1.6 Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan salah satunya untuk menciptakan rumah yang layak huni.

Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak zaman dulu, kemiskinan sudah dirasakan nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajah yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan dan tidak ada keberdayaan. Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang dasar UUD 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka

setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga dalam pendidikan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, dan martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa yang cerdas. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang layak karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Menurut John F.C Turner, 2020, (dalam bukunya Freedom To Build) mengatakan, “Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu.

Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 2019: 432), rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan.

Menurut Azwar, 2017; Mukono, 2000. Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga sebagai status lambang sosial.

2.1.7 Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Mengacu pada kepuasan yang dirasakan seseorang berdasarkan konsumsi pendapatan pendapatan. Namun tingkat kepuasan itu sendiri tergantung pada konteksnya karena dipengaruhi oleh tingkat kepuasan yang dihasilkan dari penggunaan pendapatan tersebut. Kebahagiaan meliputi tatanan kehidupan serta unsurunsur sosial, material, dan spiritual yang dipenuhi perasaan aman, kesopanan, dan kedamaian lahir dan batin yang memungkinkan setiap anggota masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial baik dalam keluarga maupun dalam keluarga. dalam masyarakat (Islamia & E., 2015, Kesejahteraan).

Kesukaan merujuk pada tingkat kepuasan yang dirasakan oleh seseorang dari pengeluaran yang digunakan, walaupun konsep kesukaan itu sendiri relatif karena bergantung pada tingkat kepuasan yang diperoleh dari pengeluaran yang dilakukan. Keterhubungan antara gagasan kesukaan dan gagasan kebutuhan adalah bahwa dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, individu dianggap berada dalam keadaan sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan petunjuk kesukaan (Pramata, 2018).

Kebahagiaan merupakan ukuran masyarakat yang artinya sudah dalam keadaan sejahtera. Pengertian kemakmuran sendiri adalah suatu keadaan manusia

dimana seseorang berada dalam keadaan berkelimpahan, sehat dan sejahtera, untuk mencapai keadaan tersebut perlu dilakukan usaha sesuai dengan kemampuannya. Ekonomi menganggap kebahagiaan sebagai indikator pendapatan individu (arus pendapatan) dan daya beli masyarakat adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Konsep kebahagiaan memiliki makna yang terbatas dalam situasi ini karena hanya melihat pendapatan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Ini menyiratkan bahwa kebahagiaan diartikan sebagai kebalikan dari kemiskinan (Dwi 2015 seperti yang dikutip oleh Widyastuti 2018).

Menurut Tadaro dan Smith (dalam Badrudin 2015), Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi ;

1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kehidupan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan,

2) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilainilai kemanusiaan, dan

3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Suryanto dan Soesilowati (dalam Badrudin 2020) kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan dan dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu

memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri (2023) Kerangka Pemikiran adalah dasar pemikiran yang menurut memuat perpaduan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

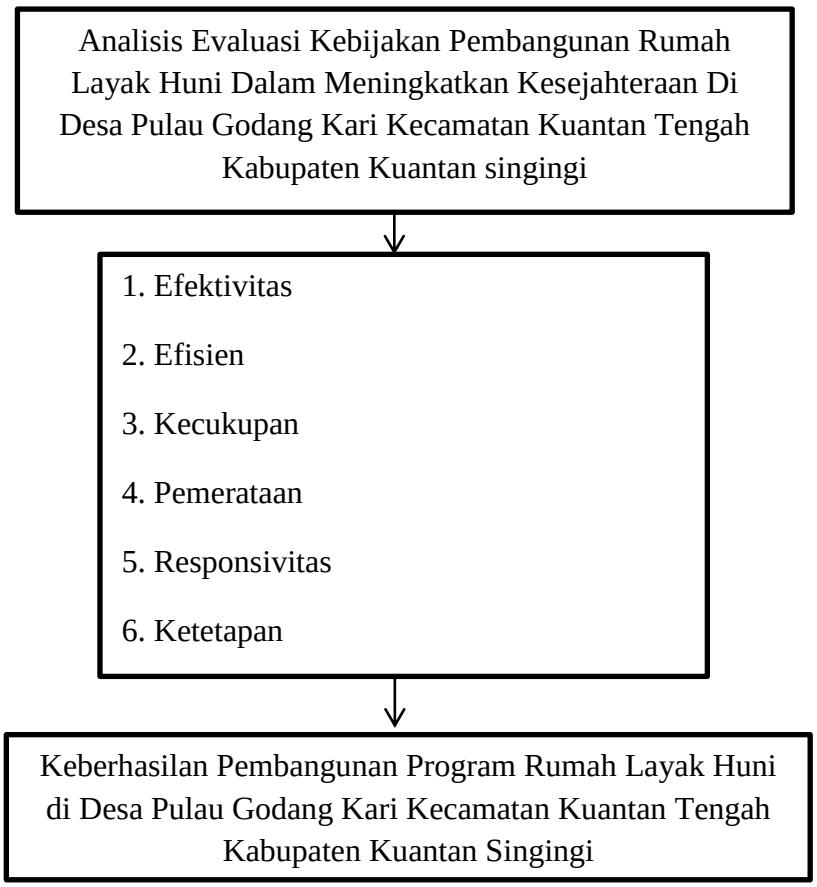

Sumber: Teori Evaluasi William N. Dunn (2015)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori diatas maka peneliti mengajukan hipotesis dari masalah yang dihadapi yaitu, tidak tepat sasaran dalam mengambil data dilapangan, anggaran atau dana bantuan telah tersedia dan disalurkan, proses pembangunan banyak yang belum selesai, bahkan ada rumah yang tidak selesai pemasangan lantai keramik nya.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (singarimbum (2020)). Operasional berisi tentang indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel. Yang menjadi variabel dalam penelitian Evaluasi Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Pulau Godang Kari.

2.4.1 Efektivitas.

Penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan pelaksanaan program berjalan dengan adil atau tidak diskriminatif.

2.4.2 Efisien

Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.4.3 Kecukupann

Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.

2.4.4 Pemerataan

Pendistribusian dana yang merata dan adil serta fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.4.5 Responsvitas

Bagaimana manfaat dari pembangunan rumah layak huni tersebut sudah membantu perekonomian masyarakat miskin yang telah mendapatkan pembangunan rumah layak huni tersebut.

2.4.6 Ketetapan

Pelaksanaan dan pencairan dana sesuai dengan ketetapan waktu yang telah ditentukan serta hasil yang dicapai harus memberikan manfaat untuk penerima bantuan rumah layak huni.

II.2 Tabel Operasional Variabel

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Evaluasi Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Pulau Godang Kari	Efektivitas	a. Penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan b. Pelaksanaan program berjalan dengan adil/tidak deskriminatif
	Efisiensi	a. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
	Kecukupan	a. Seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah
	Pemerataan	a. Pendistribusian dana yang merata dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
	Responsivitas	a. Manfaat dari pembangunan rumah layak huni tersebut sudah membantu perekonomian masyarakat miskin yang telah mendapatkan pembangunan rumah layak huni tersebut
	Ketetapan	a. Pelaksanaan program sesuai dengan ketetapan waktu yang ditentukan b. Program Bantuan RLH sudah tepat sasaran c. Hasil yang dicapai harus memberikan manfaat untuk penerima

Sumber: Teori Evaluasi William N. Dunn (2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut moleong (2017 : 6) penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, persepsi tindakan dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan dengan cara deskripsi berwujud kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan bermacam metode alamiah.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016 : 54) informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Metode menentukan narasumber bagi pegawai yaitu penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan tertentu, dan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan secara sengaja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Adapun informan penelitian tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Jumlah Persentasi
1.	Kepala Dinas	1	10%
2.	Kepala Desa	1	10%
3.	Perangkat Desa	4	40%
4.	Masyarakat	4	40%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Tahun, 2026

3.3 Sumber Data

Menurut Lofland dan loflan bahwa sumber data utama di dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, dan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya (Moleong, 2017). Bila dilihat dari sumber data, Sugiyono (2020) menyatakan pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2020 : 193) Data primer merupakan sumber data primer atau sumber data utama adalah sumber data yang didapat secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data secara langsung baik secara individu maupun kelompok, lisan maupun tulisan.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020 : 104) Data sekunder adalah sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, minsalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah kebijakan yang menjadi kebijakan yang berarti kekuatan atau kemampuan untuk mengalihkan sesuatu. Oleh karena itu dalam organisasi yang dihasilkan adalah bentuk perwujudan dalam suatu kebijakan.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Godang Kari, yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Desa Pulau Godang Kari dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa yang menerima program bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, yang diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Dengan melakukan penelitian di lokasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020 : 105) menyatakan bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6.1 Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2020 : 114) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.2 Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2020 : 109) Observasi adalah kondisi utama dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi social sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistic (menyeluruh).

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020 : 124) Dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

3.7 Metode Analisa Data

Menurut Sugiyono (2020 : 131) Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam-dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																								
			Oktober 2025				November 2025				Desember 2025					Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul					■																					
2	Pengeluaran Surat Keputusan						■																				
3	Persiapan Penyusunan Proposal							■	■																		
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■													
5	Seminar Proposal														■												
6	Revisi Proposal															■	■										
7	Skripsi																									■	

Sumber : Modifikasi Peneliti 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Pulau Godang Kari

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Pulau Godang Kari adalah bagian dari kenegrian kari pada tahun 1980 dimekarkan menjadi 4 Desa, dengan adanya aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemekaran desa, maka dengan demikian dari salah satu banjar dikari di mekarkan menjadi Desa dengan sebutan Desa Pulau Godang Kari secara Definitif. Secara marathon mulailah penduduk yang semula pada awal pemekaran tepatnya Desa Pulau Godang Kari yang penduduknya hanya sekitar 980 jiwa dengan potensi desa yang bersumber dari pertanian dengan persentase 80% penduduk berprofesi sebagai petani dan 20% sebagai PNS, Pedagang dan Swasta.

Dengan terbentuknya Desa Pulau Godang Kari maka mulailah potensi desa dibangun secara berangsur-angsur, dimulai dengan membantu Gedung Kantor Kepala Desa dengan ukuran 8 kali 8 M. Dan tahap demi tahap terus dilakukan pembenahan diri baik dibidang infrastruktur maupun dibidang lainnya yang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2 Letak Geografis Desa Pulau Godang Kari

Letak Geografis Desa Pulau Godang Kari, terletak diantara:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Sungai Jering
2. Sebelah Selatan : Desa Pulau Kedundung

3. Sebelah Barat : Koto Taluk
4. Sebelah Timur : Kelurahan Simpang Tiga

4.3 Visi dan Misi Desa Pulau Godang Kari

4.3.1 Visi Desa

" Terwujudnya Masyarakat Desa Pulau Godang Kari yang aman, tentram, agamis, maju, sejahtera, makmur, bermartabat dan berkeadilan ".

4.3.2 Misi Desa

1. Melakukan reformasi system kinerja aparatur Pemerintah Desa guna Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi:
    1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
    2. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)
    3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
3. Menciptakan kondisi masyarakat Pulau Godang Kari yang:
    1. Tertib
    2. Aman dan Rukun
    3. Tidak membedakan pandangan, suku dan keturunan
4. Optimalisasi atau sempurna penyelenggaraan Pemerintah Desa Pulau Godang Kari:
    1. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan dan undang-undang.
    2. Pelayanan masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat, dan benar.

3. Pelaksanaan pembelajaran yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
4. Majunya Desa tergantung warganya yang rukun dan bekerja secara bersama-sama.
5. Mengorganisir Kaum Pemuda Desa Pulau Godang Kari dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan.
6. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan bebas dari bentuk penyelewengan lainnya.
7. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga yang mengelola produktivitas masyarakat Desa.
8. Pengelokasian dan anggaran berdasarkan prioritas agar program pemerintah desa berjalan secara cepat, tepat, dan akurat dan berdampak kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
9. Menggali potensi desa baik berupa SDA dan SDM untuk menunjang kemandirian Desa.

4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Pulau Godang Kari dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Di Desa Pulau Godang Kari

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentasi (%)
1.	Laki-laki	1.090 Orang	49,7%
2.	Perempuan	1.103 Orang	50,3%
Jumlah		2.193 Orang	100 %

Sumber: RPJM Desa Pulau Godang Kari 2022-2027

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.090 Orang (49,7%) sedangkan mereka yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.103 Orang (50,3%). Jadi rata-rata yang diperoleh

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Desa Pulau Godang Kari adalah beragama Islam.

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Pulau Godang Kari

No	Jenis Agama	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Islam	2.193 Orang	100%
2.	Khatolik	-	-
3.	Protestan	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
Jumlah		2.193 Orang	100 %

Sumber: RPJM Desa Pulau Godang Kari 2022-2027

4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan Desa Pulau Godang Kari dilihat dari tingkat Pendidikan masing-masing dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Di Desa Pulau Godang Kari

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	TK/PAUD	-	-
2.	SD/MI	387 Orang	17,6%
3.	SLTP/MTS	243 Orang	11,0%
4.	SLTA/MA	995 Orang	45,4%
5.	S1/Diploma	493 Orang	22,5%
6.	Putus Sekolah	75 Orang	3,5%
7.	Buta Huruf	-	-
Jumlah		2.193 Orang	100%

Sumber: RPJM Desa Pulau Godang Kari 2022-2027

4.7 Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai priotitas utama dalam pembangunan berkembang baik di Desa Pulau Godang Kari. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai SMP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Pulau Godang Kari

No	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah (Buah)	Persentase (%)
1.	TK/PAUD	1	33,3%
2.	SD/MI	1	33,3%
3.	SLTP/MTS	1	33,4%
Jumlah		3	100%

Sumber: RPJM Desa Pulau Godang Kari 2022-2027

4.8 Jumlah Rumah Ibadah

Untuk menjalankan perintah Agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah, dimana juga tempat ibadah ini selain dari tempat ibadahnya juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Tabel IV.5 Jumlah Rumah Ibadah di Desa Pulau Godang Kari

No	**Jenis Rumah Ibadah**	**Jumlah (Buah)**	**Persentase (%)**
1.	Masjid	2	33,4%
2.	Surau/Mushollah	4	66,6%
Jumlah		6	100%

Sumber: RPJM Desa Pulau Godang Kari 2022-2027

4.9 Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di Desa Pulau Godang Kari, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, menunjukkan masyarakat dengan kehidupan sosial yang cukup baik, menjunjung tinggi adat-istiadat lokal, khususnya adat **Suku Nan Onam**, dengan upaya pelestarian adat melalui bimbingan generasi muda dan kegiatan rutin, meskipun juga menghadapi tantangan modernisasi dan pengaruh budaya luar. Kehidupan sosialnya erat kaitannya dengan adat dan tradisi setempat yang dijaga agar tidak mudah terpengaruh budaya asing, seperti yang terlihat dari kegiatan

adat dan rumah godang suku nan onam. Secara keseluruhan, masyarakat Pulau Godang Kari berupaya menjaga keseimbangan antara kehidupan modern dan pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi identitas mereka.

4.10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Menganut Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar sebagai berikut.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

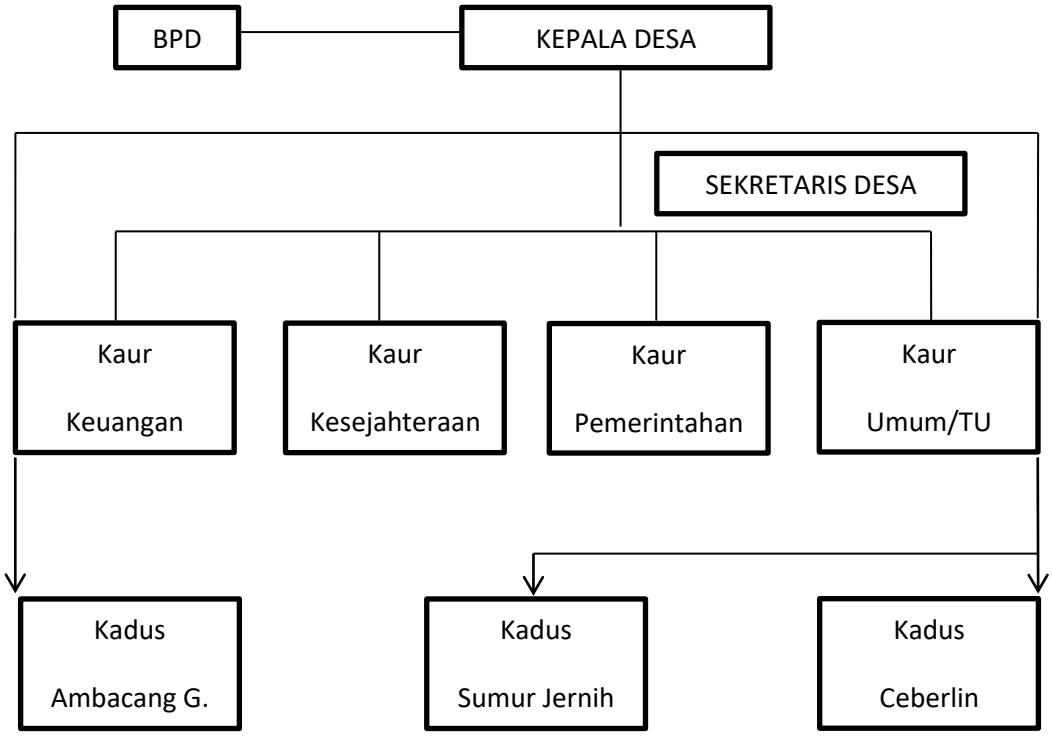

Sumber: RPJM Desa Pulau Godang Kari 2022-2027

4.11 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Desa

   a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

   b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Perencana an Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Kesejahteraan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun

   c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

   1) Menyelennggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan ketentraman dan keterlibatan, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah

   2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

   Badan permusyawaratan Desa tugasnya adalah menyelenngarakan musyawarah desa (Mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, dan tokoh masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

   1. Menyalurkan Aspirasi
   2. Merencanakan APBDes
   3. Mengawasi Pemerintahan Desa

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

5. Membina kehidupan masyarakat desa

6. Membina perekonomian desa

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

a. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretarias desa mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanaan umum asset.

3) Melakasanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventalisir datadata dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahanUntuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verfikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

3. Kepala urusan pemerintahan memiliki fungsi seperti administrasi kependudukan, ketertiban masyarakat, penataan wilayah, dan pengelolaan data profil desa.

4. Kepala urusan kesejahteraan memiliki fungsi menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, pertanian, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kepala Dusun Kepala

kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala kewilayahan / kepala dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungaanya
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwisastra, J. (2006). Prolog*: Implementasi Kebijakan Publik, menjembatani visi dengan realitas*. In H. Tachjan (Ed.), Implementasi Kebijakan Publik. Tidak disebutkan.

AR, M. (2004). *Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal MEDTEK, 2(3), 78–91.

Bintaro. (2017). *Pembangunan desa dan permasalahannya.* Bandung: Alfabeta.

Boeke, J. H. (2015). *Ekonomi dualistis.* Jakarta: LP3ES.

Desrinelti. (2021). *Kebijakan Publik dan Konsep Pelaksanaan*. Tidak disebutkan.

Dunn, William N. (2015). *Public Policy Analysis (5th ed.).* Pearson.

Dunn, W.N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.

Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantin, K. (2021). *Implementasi kebijakan program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar.* Kinerja, 18(4), 539–546.

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik.* Widya Karya.

Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik*: Perspektif Administrasi Publik di Indonesia. CV Dharma Persada.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (edisi pdf).* Universitas Negeri Gorontalo.

Malayu, S.P. Hasibuan (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara Jakarta.

Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. f. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid 19.* Jurnal Administrasi Publik, 7, 99.

Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. CV Anugrah Utama Raharja.

Molas-Gallart, J.,& Tang, P (2011). *Assessing the Social Impacts of public Program.* Edward Elga Publishing.

Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi).* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muasaroh, 2010. *Aspek-aspek Efektivitas.* Studi tentang Efektivitas pelaksanaan program. Literatur Buku, Yogyakarta

Nurcholis, H. (2019). *Pemerintahan Desa.* Jakarta: Bumi Aksara.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. *Kebijakan Publik* (pp. 1–144).

Ramadani, S. (2019). *Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif*. Padang: Pe UNP Press.

Riady, P. (2022). *Teori Pembangunan: Pendekatan dan Implementasi* (hlm. 322) Rajawali Pers.

Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebiajakn Publik* (p. 237). Jawa Timur: UMSIDA Press

Roslin Sovia, dkk. (2022). *Administrasi Perkantoran berbasis Teknologi Informasi.* Malang: Universitas Brawijaya Press.

RPJM-DES_PULAU_GODANG_KARI_TAHUN_2022-2027

Salempessy, M. (2023). *Kebijakan Publik.* CV Gita Lentera.

Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U., Abdurohim, Amane, A. P. O., … Siallagan, D. Y. (2023). *ISBN KEBIJAKAN PUBLIK (pdf.io).pdf.*

Slamet Rujito, S.IP, M.Si. (2024). *Kebijakan dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Pembangunan Daerah, 1(1), 32–54. https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210

Studies, H., & Sukmasari, D. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat, 3(1), 1–16.*

Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Pustaka Pelajar.*

Suhartono. (2019). *Teori dan konsep pembangunan desa.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutrisno. (2013). *Manajemen Program dan Evaluasi.* Andi Offset.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafie, I. (2010). *Ilmu Administrasi Publik.* Rineka Cipta

Tikson, D. T. (2016). *Teori Pembangunan: Modernisasi, Keterbelakangan, dan Ketergantungan.* Subaltern Inti Media. Makasar. ISBN 978-623-5587-97-4.

Todaro, M.P.,&Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.).* Person.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Winarno, B. (2018). EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG. *Jurnal Pengembangan Kota*, *6*(1), 66. https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74

ACC Turun Lapang.
2/25

DAFTAR WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama	: Tiara Dia Pransiska
NPM	: 220411088
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Judul	: Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan

I. Efektivitas

1. Bagaimana kriteria penerima bantuan rumah layak huni?
   .....
   .....
2. Bagaimana keadilan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni?
   .....
   .....

II. Efisiensi

1. Bagaimana usaha yang diperlukan untuk bantuan rumah layak huni?
   .....
   .....
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni untuk hasil yang diinginkan?
   .....
   .....

III. Kecukupan

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni untuk tercapainya hasil yang diinginkan?
   .....
   .....
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dalam memecahkan masalah?
   .....
   .....

IV. Pemerataan

1. Bagaimana pendistribusian dana yang diberikan untuk pembangunan rumah layak huni?
   .....
   .....
2. Bagaimana fasilitas yang diberikan untuk pembangunan rumah layak huni?
   .....
   .....

V. Responsivitas

1. Bagaimana perekonomian masyarakat yang telah mendapatkan bantuan rumah layak huni?
   .....
   .....
2. Bagaimana manfaat rumah layak huni bagi masyarakat miskin?

VI. Ketetapan

1. Bagaimana waktu pelaksanaan pembangunan rumah layak huni ?

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana mengidentifikasi bahwa pembangunan rumah layak huni sudah tepat sasaran?

.....

.....

.....

.....

Teluk Kuantan, februari 2026

informan

(.....)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG ANALISI EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Gambar 1 : Responden atas Nama Suskanur Febriantoni, ST,MSi,. Mengisi Kuisioner Penelitian



Gambar 2 : Responden atas nama Yulisman Sedang Mengisi Kuisioner.



Gambar 3 : Responden atas nama Ivan Yandri Sedang Mengisi Kuisioner.



Gambar 4 : Responden atas nama Engki Tornando Sedang Mengisi Kuisioner.



Gambar 5: Responden atas nama Deni Harpes Sedang Mengisi Kuisioner



Gambar 6: Responden atas nama Sisi Yuliani Sedang Mengisi Kuisioner



Gambar 7: Responden atas nama Jumailis Sedang Mengisi Kuisioner.



Gambar 8 : Responden atas nama Ides Deka Sedang Mengisi Kuisioner.



Gambar 9: Responden atas nama Deti Sedang Mengisi Kuisioner.



Gambar 10 : Responden atas nama Juriati Sedang Mengisi Kuisioner.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561855 Fax.0760-561855,e-mail unikakuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR 058 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnolo gi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

a. Pembimbing I : Emilia Encharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002
b. Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
Nama : Tiara Dia Prasiska
NPM : 220411088
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030818402

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Administrasi Negara*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemda Kab. Kuantan Singingi Telp. (0760) 561571, 561572, 561573
TELUK KUANTAN 29562

Teluk Kuantan, 14 April 2026

Nomor : 600/DPKPP-SEKR/2026/669
Lampiran : -
Hal : Permohonan Riset

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Unversitas Islam Kuantan Singingi
di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor 035/FIS/UNIKS/III/2026 tanggal 06 Maret 2026 perihal Permohonan Riset atas mahasiswa sebagai berikut :

Nama : TIARA DIA PRANSISKA
NPM : 220411088
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara

Saat ini Mahasiswa yang bersangkutan Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan Kegiatan Sebagai Berikut :

Judul Penelitian : Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pulau Hodang Kari Kec. Kuantan Tengah
Lokasi Penelitian : Dinas Perkimtan dan Kantor Desa Pulau Godang Kari

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menyetujui dan menerima permohonan Riset dimaksud yang berada pada lokasi yang telah di tentukan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIM
DAN PERTAHANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

M. GEMURUH, ST.,MT
Penata Tk. I
NIP. 19790203 200801 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA PULAU GODANG KARI
Jalan Utama Desa Pulau Godang Kari Kode Pos 29562

Pulau Godang Kari, 10 Februari 2026

Nomor : 045/PGK/II/2026
Lampiran : -
Perihal : ***Surat Balasan Permohonan Izin penelitian***

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara dengan Nomor surat : 141/FIS/UNIKS/XI/2025 Tanggal 22 Desember 2025 perihal izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Tiara Dia Pransiska dengan judul, "Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi"

Pelrlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 30 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

Pulau Godang Kari, 10 Februari 2026
KEPALA DESA PULAU GODANG KARI

YULISMAN, S.Pd, SD
Nip. 19740701199803 1 007

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA PULAU GODANG KARI
Jalan Utama Pulau Godang Kari Kode Pos 29562

Pulau Godang Kari, 7 April 2026

Nomor : 045/PG/II/2026
Lampiran : -
Perihal : ***Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian***

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Di-
Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama : Yulisman
Jabatan : Kepala Desa Pulau Godang Kari
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : Tiara Dia Pransiska
Npm : 220411088
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Administrasi Negara

Telah selesai melakukan penelitian dan data penelitian di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dihitung mulai tanggal 22 Desember 2025 s/d 22 Januari 2026 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " **Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabaputen Kuantan Singingi"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Pulau Godang Kari, 7 April 2026
KEPALA DESA PULAU GODANG KARI

YULISMAN, S.Pd, SD
Nip. 19740701199803 1 007

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail uniksKuanta...@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Desember 2025

Nomor : 141/FIS/UNIKS/XII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Riset**

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Tiara Dia Pransiska
NPM	: 220411088
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Pulau Godang Kari Kec. Kuantan Tengah
Lokasi Penelitian	: Dinas PERKIM dan Kantor Desa Pulau Godang Kari

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 11/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:141/FIS/UNIKS/XII/2025 Tanggal 22 DESEMBER 2025.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**TIARA DIA PRANSISKA**
NIM	:	220411088
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA PULAU GOBANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**1. DINAS PERKIM KABUPATEN KUATAN SINGINGI 2. KANTOR DESA PULAU GODANG KARI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : TIARA DIA PRANSISKA
NPM : 220411088
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
Dosen Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
JUDUL : Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1		* Pertajam Analisa data dengan didukung Perundang-undangan *			
2		Perbaiki daftar Pustaka			
3		Surat keterangan sudah melaksanakan Penelitian			
4					
5		Acc. Utk diuji			
6					

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Teluk Kuantan, ...2025

Pembimbing I

Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Pembimbing II

Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : TIARA DIA PRANSISKA
NPM : 220411088
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
Dosen Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
JUDUL : Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1		* Diumpikan			
2					
3					
4					
5					
6					

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Teluk Kuantan, ...2025

Pembimbing I

Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Pembimbing II

Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : TIARA DIA PRANSISKA

NPM : 220411088

DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
Dosen Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si

JUDUL : Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	18 november 2025	-Tambahkan definisi jompo dan lansia -Tambahkan teori terbaru			
2		-			
3					
4					
5					
6					

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Teluk Kuantan, ...2025

Pembimbing I

Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Pembimbing II

Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : TIARA DIA PRANSISKA
NPM : 220411088
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
Dosen Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
JUDUL : Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	23/10-2025	* Perbaiki rumusan cover * Pertajam latar Belakang		[signature]	
2	2/11-2025	* Paragraf * Teori yg di gunakan utk Indikator lain dijelaskan		[signature]	
3	5/11-2025	Perbaiki lagi cover.		[signature]	
4		Perjelas Sumber Konsep dan Teori		[signature]	
5	11/11-2025	Perbaiki lembaran yang di lipat		[signature]	
6	13/11-2025	Rapikan dan Daftar Pustaka		[signature]	

7	7/11-2025	Acc. lete di Seminar Kan		[signature]	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Teluk Kuantan, ...2025

Pembimbing I

Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Pembimbing II

Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Form 12

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Tiara Dia Pransiska

NPM : 220411088

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Senin / 01 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Tiara Dia Pransiska**

NPM : 220411088

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 18 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Tiara Dia Pransiska
Tempat/Tanggal Lahir	: Pulau Godang/09 Oktober 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Menikah
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Pulau Godang Kari
Alamat Email	: tiaradiapranciska91004@gmail.com
Pendidikan	: 1. Tahun 2012 LULUS TK Awalia Pulau Banjar
	2. Tahun 2018 LULUS SD Negeri 020 Pulau Godang
	3. Tahun 2021 LULUS SMP Negeri 3 Teluk Kuantan
	4. Tahun 2022 LULUS SMAN 1 Teluk Kuantan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 2026

Penulis

TIARA DIA PRANSISKA
NPM.220411088